



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900 /Kep.23/2025

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 November 2024 hal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan resiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (3) dan disesuaikan dengan jadwal Objek Pemeriksaan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya Perubahan Jadwal dan Objek Pemeriksaan maka dilakukan revisi oleh Inspektur terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEEMPAT : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **3** Februari 2025

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Kerinci.
4. Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Kerinci.
6. Kabag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Camat dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Desa dan Ketua BPD dalam Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 900/Kep.23/2025

TANGGAL : 3 - Feb - 2025

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		HP						Uang Harian	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Wilayah Irbn	Keterangan
						RMP	RPL	PJ	WPJ	DN	KT	AT	Jumlah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Reviu LKPD oleh APIP	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018)	Perangkat Daerah	8	01.02	04.03	1	1	1	1	4	8	150.000	9.600.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
2	Reviu DAK (Triwulan I)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.02	04.02	1	1	4	4	12	22	150.000	16.500.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
3	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa (Tahap I)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020)	Perangkat Daerah	20	01.02	04.02	1	1	4	4	37	47	150.000	141.000.000	71	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	Desa Sampel
4	Reviu Tata Kelola BMD, termasuk Reviu atas Rencana Kebutuhan BMD	Reviu	Untuk memberikan penguatan atas tata kelola BMD sehingga dapat mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan	Perangkat Daerah	5	02.02	03.02	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
5	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Tata Kelola Pajak Daerah dan upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.02	03.02	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
6	Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pendampingan		Perangkat Daerah	5	03.02	04.02	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
7	Reviu rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah (RENJA)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Renja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	03.02	04.02	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
8	Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko	Evaluasi	Untuk memberikan penguatan atas optimalisasi asistensi penerapan manajemen resiko	Perangkat Daerah	5	01.03	02.03	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
9	Reviu RKPD oleh APIP	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan RKPD sesuai dengan ketentuan yang	Perangkat Daerah	5	01.03	01.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
10	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.03	03.03	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	Evalop	
11	Audit Investigasi (Triwulan I)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	Perangkat Daerah	10	01.03	03.03	1	1	1	3	4	10	150.000	15.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbansus	
12	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dan upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan	Perangkat Daerah	10	01.03	03.03	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	
13	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dan upaya Optimalisasi penggunaan Belanja Daerah sesuai dengan	Perangkat Daerah	5	01.03	02.03	1	1	4	4	3	13	150.000	9.750.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	perwilayah kerja
14	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi Nasional pencegahan korupsi	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.03	04.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn I, II, III dan Irbansus	

15	Capaian Aksi koordinasi dan survei Pencegahan Korupsi terintegrasi yang dikordinasikan KPK	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.03	04.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
16	Operasional Saber Pungli	Monitoring	Untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Perangkat Daerah	5	01.03	04.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
17	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah 2024	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.03	02.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
18	Monev Pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 jam	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	02.03	02.03	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
19	Pemeriksaan Akuntabilitas Pembiayaan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pembiayaan Daerah dan upaya Optimalisasi Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.03	03.03	1	1	4	4	3	13	150.000	9.750.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	perwilayah kerja
20	Reviu Laporan Kinerja	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.03	03.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
21	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020)	Perangkat Daerah	5	02.03	03.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
22	Pemeriksaan Manajemen Kas dan Persediaan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai manajemen Kas dan Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	03.03	03.03	1	1	4	4	3	13	150.000	9.750.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	PD Sampel
23	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	Untuk memberikan penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan	Perangkat Daerah	5	03.03	04.03	1	1	4	4	3	13	150.000	9.750.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
24	Pengendalian Gratifikasi	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	03.03	03.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
25	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	03.03	03.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
26	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	03.03	04.03	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
27	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan	Audit	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dan upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan	Perangkat Daerah	5	04.03	04.03	1	1	4	4	3	13	150.000	9.750.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	perwilayah kerja
28	Reviu HPS Paket Strategis d Pemda	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah sesuai peraturan	Perangkat Daerah	5	01.04	01.04	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Proyek Strategis Daerah
29	Audit Kinerja	Audit	Menilai 3E atas Program yang dilaksanakan dinas	Perangkat Daerah	10	01.04	03.04	1	1	4	4	4	14	150.000	21.000.000	8	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
30	Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	02.04	02.04	1	1	4	3	8	17	150.000	12.750.000	4	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
31	Reviu Pelayanan Publik dan Transfer bidang, Pendidikan, Kesehatan dan Capil	Reviu		Perangkat Daerah	5	03.04	03.04	1	1	1	3	8	14	150.000	10.500.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
32	Evaluasi Implementasi SAKIP	Evaluasi	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan terhadap pelaksanaan Implementasi SAKIP Daerah	Perangkat Daerah	5	01.05	02.05	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
33	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa (Tahap II)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020)	Perangkat Daerah	20	02.05	04.05	1	1	4	4	37	47	150.000	141.000.000	71	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Desa Sampel

34	Reviu DAK (Triwulan II)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.06	04.06	1	1	4	4	12	22	150.000	16.500.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
35	Reviu Bantuan Pemerintah daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Hibah dan Bantuan Sosial Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.06	04.06	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	8	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
36	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.06	04.06	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
37	Monev Pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 jam pertahun	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.06	04.06	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
38	Audit Investigasi (Triwulan II)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.06	04.06	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	Irbansus	
39	Reviu SHS dan ASB 2025	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen SSH.	Perangkat Daerah	5	02.06	02.06	1	1	4	4	8	18	150.000	13.500.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
40	Probit Audit 10 Proyek Strategis di Pemda	Probit		Perangkat Daerah	10	02.06	02.06	1	1	4	4	8	18	150.000	27.000.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
41	Reviu PAPBJ oleh APIP (Triwulan II)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	03.06	03.06	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Triwulan
42	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	04.06	04.06	1	1	1	2	8	13	150.000	9.750.000	2	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I dan III	
43	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dan upaya Optimalisasi penggunaan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	10	01.07	02.07	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
44	Pengendalian Gratifikasi	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
45	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
46	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
47	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi Nasional pencegahan korupsi	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
48	Capaian Aksi koordinasi dan survei Pencegahan Korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
49	Operasional Saber Pungli	Monitoring	Untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Perangkat Daerah	5	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
50	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Monitoring		Perangkat Daerah	10	01.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
51	Kapabilitas APIP	Monitoring		Perangkat Daerah	5	01.07	03.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
52	Maturitas SPIP	Monitoring		Perangkat Daerah	5	01.07	03.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	

53	Reviu RKPD Perubahan 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan RKPD Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.07	03.07	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
54	Pemeriksaan Akuntabilitas Pembiayaan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pembiayaan Daerah dan upaya Optimalisasi Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	10	02.07	03.07	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
55	Pemeriksaan Manajemen Kas dan Persediaan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai manajemen Kas dan Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	10	03.07	04.07	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
56	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	Untuk memberikan penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman	Perangkat Daerah	10	04.07	01.08	1	1	1	1	4	8	150.000	12.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
57	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan antara Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	Perangkat Daerah	5	01.08	02.08	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
58	Reviu Tata Kelola Manajemen ASN dan Konflik Kepentingan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	02.08	03.08	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani II	
59	Reviu DAK (Triwulan III)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.09	04.9	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
60	Monev/Pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 jam setahun	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.09	04.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
61	Audit Investigasi (Triwulan III)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	Perangkat Daerah	5	01.09	04.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
62	Reviu RKA Perubahan 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen RKA berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.09	02.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	Seluruh PD
63	Reviu KUA PPAS Perubahan 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen KUA PPAS berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.09	02.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
64	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi		Perangkat Daerah	5	02.09	03.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
65	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	03.09	04.09	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
66	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dan upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	
67	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dan upaya Optimalisasi penggunaan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansu	

68	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Profesi dan Mutasi ASN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Rekrutmen, Profesi dan Mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	8	12	150.000	9.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
69	Pemeriksaan Akuntabilitas Pembiayaan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pembiayaan Daerah dan upaya Optimalisasi Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
70	Pemeriksaan Manajemen Kas dan Persediaan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai manajemen Kas dan Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
71	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	Untuk memberikan penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
72	Pengendalian Gratifikasi	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
73	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
74	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
75	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi Nasional pencegahan korupsi	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
76	Capaian Aksi koordinasi dan survei Pencegahan Korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
77	Operasional Saber Pungli	Monitoring	Untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
78	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Monitoring		Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
79	Reviu RKA 2026	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen RKA berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
80	Reviu KUA PPAS Perubahan 2026	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan penyusunan dokumen KUA PPAS berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.10	04.10	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
81	Reviu DAK (Triwulan IV)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	4	4	4	14	150.000	10.500.000	10	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
82	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah (Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial)	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan Hibah dan Bantuan Sosial Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	3	8	14	150.000	10.500.000	8	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
83	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	
84	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah dan upaya Optimalisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbab I, II, III dan Irbansus	

85	Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah dan upaya Optimalisasi penggunaan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
86	Pemeriksaan Akuntabilitas Pembiayaan Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akuntabilitas Pembiayaan Daerah dan upaya Optimalisasi Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
87	Pemeriksaan Manajemen Kas dan Persediaan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai manajemen Kas dan Persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
88	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu	Untuk memberikan penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi,	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
89	Pengendalian Gratifikasi	Evaluasi	Untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan gratifikasi telah dilaporkan sesuai peraturan dan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
90	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
91	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Memberikan keyakinan bahwa kegiatan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
92	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi Nasional pencegahan korupsi	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
93	Capaian Aksi koordinasi dan survei Pencegahan Korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK	Monitoring	Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Tata Kelola BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
94	Operasional Saber Pungli	Monitoring	Untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Perangkat Daerah	5	01.11	04.11	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
95	Audit Kantor Camat	Ketaatan	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan pada Kantor Camat sesuai dengan peraturan perundang-	Kantor Camat dalam Kab. Kerinci	12	01.11	04.11	1	1	4	8	40	54	150.000	97.200.000	18	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	seluruh Camat
96	Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Ketaatan	Untuk Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya	Perangkat Daerah	12	01.11	04.11	1	1	4	8	40	54	150.000	97.200.000	46	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	Seluruh PD
97	Monev Pendidikan Profesional berkelanjutan minimal 120 jam setahun	Monitoring	Untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan	Perangkat Daerah	5	01.12	04.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	1	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	
98	Audit Investigasi (Triwulan IV)	Audit	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan sudah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang	Perangkat Daerah	5	01.12	04.12	1	1	1	1	4	8	150.000	6.000.000	3	Laptop, ATK	Tinggi	Irbani I, II, III dan Irbansus	

Keterangan:

IRBANSUS	: Inspektur Pembantu Khusus
PJ	: Penanggung Jawab
WP	: Wakil Penanggung Jawab
DS	: Pengendali Teknis
KT	: Ketua Tim
AT	: Anggota Tim
HP	: Hari Pemeriksaan
RMP	: Rencana Mulai Pemeriksaan
RPL	: Rencana Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Tingkat Risiko	: Tingkat Risiko yang dihadapi PD

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF